

PENDAMPINGAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI KELOMPOK WANITA PESISIR CUNGKENG KOTA BANDAR LAMPUNG

Lukmanul Hakim,¹ Aprinisa,² Anggalana,³ Ansori⁴

¹⁻⁴ Universitas Bandar Lampung

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung 35142 ,Indonesia

Email : lukmanul.hakim@ubl.ac.id; aprinisa@ubl.ac.id; anggalana@ubl.ac.id; ansori@ubl.ac.id

Abstrak: Tujuan kegiatan Pendampingan perizinan berusaha ini adalah untuk memberitahukan kepada pelaku usaha terutama kepada kelompok wanita pesisir untuk dapat membuat usaha yang semakin maju dan berkembang ke secara nasional maupun global. Mitra yang menjadi sasaran dari usulan kegiatan ini adalah Kelompok Wanita Pesisir Cungkeng, dan solidaritas perempuan. Target khusus dari program ini adalah terciptanya peningkatan perizinan bagi pelaku usaha khususnya kelompok wanita tani pesisir cungkeng. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan standarisaasi dalam penjualandan secara efisien. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah Diskusi Kelompok Fokus (*Focus Group Discussion – FGD*), pelatihan, dan pendampingan.

Kata Kunci : Kelompok Wanita Pesisir, Perizinan, Pendampingan.

1. Pendahuluan

Provinsi Lampung memiliki karakteristik wilayah yang menarik salah satunya di kota bandar lampung ada sebuah tempat di pesisir kota bandar lampung yakni di wilayah Teluk Betung, terdapat beberapa kampung nelayan, salah satunya Kampung Cungkeng. Di wilayah pesisir kampung cungkeng ini akan ada pemandangan yang tak biasa. Banyak alat untuk menangkap ikan yang menjulang tinggi di sini karena mayoritas penduduk disini merupakan nelayan. Para wanita pesisir cungkeng ini memiliki kelompok wanita yang membuat suatu produk yang berasal dari olahan cumi yaitu kerupuk cumi nona pesisir. Permasalahan yang dialami saat ini adalah minimnya informasi akan pengembangan produk yang telah dimiliki oleh kelompok wanita dipesisir cungkeng. Diantaranya adalah yakni perizinan serta packaging atau kemasan yang masih bersifat awal menggunakan plastik bening.

Pasalnya Cungkeng memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM dan wisata. "Potensinya cukup besar, kelompok perempuan nelayan juga punya produk olahan krupuk cumi dan ebi Terhadap Kelompok Wanita pesisir cungkeng, dari berbagai pelatihan dan pembinaan yang pernah diberikan kepada kelompok, belum pernah dikenalkan dan diberikan pemahaman bahwa apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha industri olahan kerupuk cumi. Seperti perizinan dan kemasan serta

penunjang lainnya, sebenarnya dapat diproduksi sendiri. Selain belum mengerti, pada sisi lain mereka dihadapkan pada tingginya tingkat persaingan usaha sejenis yang telah tersedia di toko-toko terdekat.

Diperlukan adanya pencerahan kepada Kelompok Wanita pesisir cungkeng tersebut bahwa kerupuk cumi yang diproduksi sendiri, dan karenanya akan dapat meringankan beban pengeluaran keluarga karena secara otomatis akan memberikan kontribusi positif bagi penduduk disekitar pada khususnya. Dimana dengan diproduksi sendiri, biaya yang harus dibayarkan akan jauh lebih murah dari pada mengkonsumsi barang produk pabrikan dengan kualitas yang hampir sama. Berkait dengan itu, diperlukan adanya pencerahan pula bahwa formula dan bahan baku untuk pembuatan kerupuk cumi tersebut sudah dijual bebas dan sangat mudah untuk mendapatkannya karena mayoritas penduduk merupakan nelayan sehingga kebutuhan bahan baku akan lebih mudah dimiliki. Pemberdayaan perempuan pada sektor UMKM diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan, memberikan peningkatan penghasilan, meningkatkan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia serta menyiapkan komunitas perempuan menjadi komunitas yang ramah terhadap bank dan ekonomi.¹

2. Metode

Berpijak pada konsep di atas, dan sebagaimana permasalahan, kebutuhan mitra serta kondisi dan karakter mitra, yang hendak dilakukan adalah meningkatkan pendapatan keluarga dipesisir cungkeng melalui peningkatan ketrampilan dan kapasitas produksi mitra untuk menghasilkan produk- produk bernilai ekonomis, yang dibangun dari kelembagaan dan kegiatan sosialnya. Kepada para anggota Kelompok Wanita Pesisir Cungkeng akan diberikan pelatihan dan pendampingan :

- 1) Pelatihan keterampilan pembuatan produk, yang meliputi : Pengolahan Produk. Pelatihan ini untuk menumbuhkan kemampuan memproduksi sendiri (kemandirian memenuhi) kebutuhan sendiri, yang diarahkan untuk dapat membantu mengurangi beban biaya konsumsi rumah tangga dan sekaligus (apabila memungkinkan) dapat dipasarkan kepada masyarakat luas.
- 2) Pelatihan motivasi dan skil manajerial kewirausahaan, diarahkan untuk menumbuhkan motivasi peserta untuk berwirausaha dan kemampuan mengelola usaha, yang meliputi:
 - a) Perizinan berusaha,
 - b) Manajemen pemasaran digital,
 - c) Perencanaan Penjualan Tahunan, dan
 - d) Laporan Keuangan berbasis digitalisasi.
- 3) Pendampingan kepada para peserta pelatihan, dalam rangka :
 - a) Pemahaman dan aplikasi pengetahuan dan skil manajerial, dan pembuatan produk.
 - b) Perencanaan penjualan tahunan serta manajemen pemasaran digital.

¹ Marthalina, Pemberdayaan Perempuan dalam mendukung Usaha mikro, Kecil dan menengah di Indonesia, Jurnal Pembangunan, Pemberdayaan Pemerintah, Vol 3 No 1 Juni Tahun 2018 Hlm 60

4) Monitoring dan Evaluasi.

Dari uraian diatas maka metode dan capaian yang diinginkan adalah sbb : Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif. Metode ini akan memberikan feed back kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada disekitar kawasan pesisir cungkeng di wilayah teluk betung.

3. Hasil dan Pembahasan

Perempuan wajib diberdayakan karena: 1. Perempuan mempunyai kepentingan yang sama dalam pembangunan, dan juga merupakan pengguna hasil pembangunan, yang mempunyai hak sama dengan laki-laki. 2. Perempuan juga memiliki kepentingan yang khusus sifatnya bagi perempuan itu sendiri dan anak-anak. Yang kurang optimal jika digagas oleh laki-laki karena membutuhkan kepekaan yang sifatnya khusus, terkait dengan keseharian, sosio kultural yang ada. 3. Memberdayakan dan melibatkan perempuan dalam pembangunan, secara tidak langsung akan juga memberdayakan dan menularkan semangat yang positif kepada generasi penerus, yang pada umumnya dalam keseharian sangat lekat dengan sosok ibu.²

Perempuan pesisir Bandar Lampung butuh pengakuan sebagai nelayan dari pemerintah, sebuah entitas yang turut berkontribusi dalam membangun perekonomian. Eksistensi perempuan nelayan di pesisir Bandar Lampung terlihat dari aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. "Situasi perempuan pesisir Bandar Lampung semakin rentan dengan banyaknya suami mereka yang alih profesi dari nelayan menjadi buruh bangunan. Ditambah lagi program bantuan dari pemerintah bagi nelayan sama sekali belum menyentuh kelompok perempuan pesisir. Contohnya, perempuan pesisir di Cungkeng berkali-kali menanyakan proposal bantuan ke pihak kelurahan, tapi selalu gagal.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam, belum memuat pengakuan terhadap eksistensi perempuan pesisir sebagai nelayan. Regulasi tersebut mendefinisikan nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, baik di perairan tawar, payau, maupun laut.

Sehingga, perempuan pesisir Bandar Lampung butuh pengakuan sebagai nelayan untuk dapat mengakses program pemerintah seperti Kartu Nelayan."Program dari Dinas Kelautan dan Perikanan bagus-bagus, tapi tidak menyentuh akar permasalahannya sama sekali. Padahal mereka berada di zonasi yang memang mereka berhak untuk mendapatkan itu. Terlebih juga saat ini para perempuan nelayan telah memiliki kelompok wanita usaha yang berfokus pada olahan hasil laut yang diantaranya adalah industri olahan kerupuk cumi yang dimana bahan baku didapatkan sendiri oleh para kelompok wanita usaha yang mendapat bahan baku cumi langsung dari para nelayan yang sekaligus memang sebagai suami mereka sendiri. Secara tidak langsung dengan adanya peranan dari kelompok wanita usaha pesisir cungkeng memberikan kontribusi secara positif terutama bagi pertumbuhan ekonomi di pesisir cungkeng kota bandar lampung seperti saat ini. Adapun amanat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan turunan

² Susi Ratnawati, Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Pedesaan Melalui Pengembangan kewirausahaan ISSN. 1978-4724 Jurnal Kewirausahaan Volume 5 Nomor 2, Desember 2011, hlm 3

dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM memberikan angin segar pada pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan perizinan berusaha di daerah dimana salah satu contoh yang paling cepat untuk didapatkan adalah Nomor Induk Berusaha alias NIB bagi pelaku usaha, dimana saat ini kelompok wanita usaha di cungkeng yang telah memiliki NIB secara kolektif dan tengah fokus kedalam perizinan lainnya seperti Sertifikasi pangan industri rumah tangga atau biasa sering disebut (SPP-IRT).

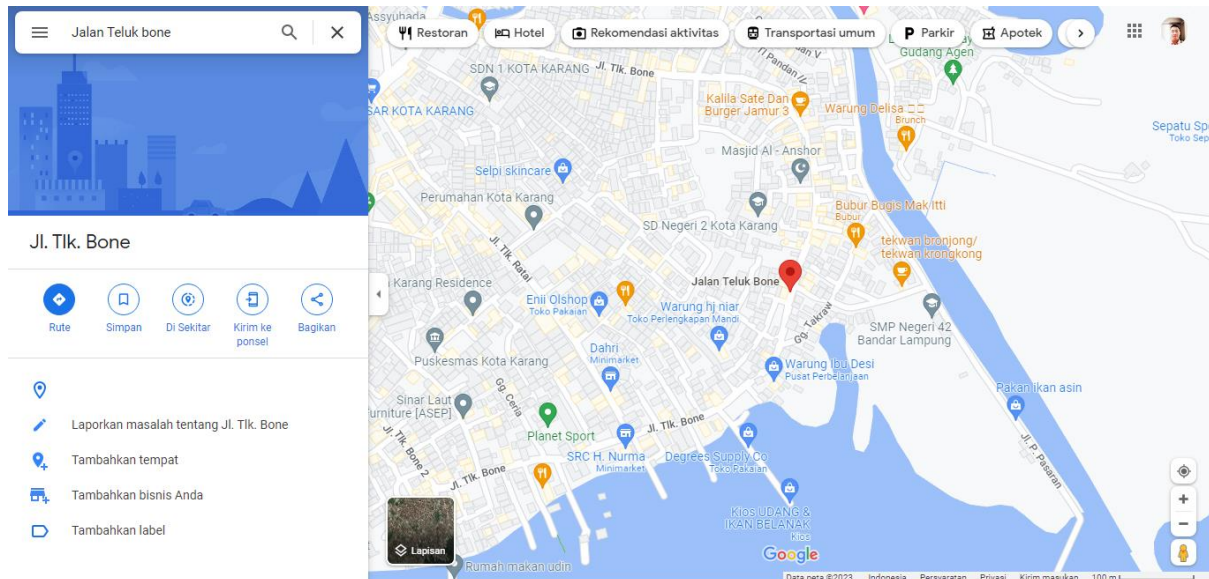
Berikut beberapa aktifitas yang dilakukan dalam proses pendampingan perizinan yang di inisiasi oleh solidaritas perempuan sebay lampung dan Pusat Studi UMKM – Universitas Bandar Lampung sebagai berikut :



Gambar 1. Aktivitas Kelompok Wanita Pesisir Cungkeng



Gambar 2. Produk yang sudah dihasilkan



Gambar 3. Peta Lokasi

Pemberdayaan perempuan dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia harus terus dioptimalkan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Disamping itu kerjasama dari berbagai pihak baik itu swasta, perbankan dan lembaga lainnya dalam memberdayakan perempuan juga sangat diharapkan. Terbukti peranan wanita pekerja yang ada di Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan pada ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan.³

4. Kesimpulan

Pentingnya pendampingan dalam kegiatan ini adalah diantaranya pengelolaan hasil perikanan dan kelautan yang diolah menjadi industri kerupuk berbahan cumi ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada secara cepat dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi di wilayah sekitar yang dimana penduduk sekitar mayoritas merupakan nelayan dan ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok wanita pesisir cungkeng. Rencana kegiatan adalah:

1. Pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan hasil perikanan dan kelautan;
2. Motivasi; dan
3. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan hasil pertanian.

³ Damai Yona Nainggolan, Pemberdayaan Dan Pengembangan Wirausaha perempuan muda pada rumah tangga miskin di kecamatan medan deli kota medan, jurnal perspektif, ISSN 2085-0328, Vol 6 No 1, April 2013, Hlm 14

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh akademisi dan praktisi yang ikut bergabung diantaranya berasal dari Solidaritas Perempuan Sebay dan Pusat Studi UMKM – Universitas Bandar Lampung yang telah memfasilitasi berjalannya kegiatan di wilayah pesisir cungkeng Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Referensi

Damai Yona Nainggolan, Pemberdayaan Dan Pengembangan Wirausaha perempuan muda pada rumah tangga miskin di kecamatan medan deli kota medan, jurnal perspektif, ISSN 2085-0328, Vol 6 No 1, April 2013,

Marthalina, Pemberdayaan Perempuan dalam mendukung Usaha mikro, Kecil dan menengah di Indonesia, Jurnal Pembangunan, Pemberdayaan Pemerintah, Vol 3 No 1 Juni Tahun 2018

Susi Ratnawati, Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Pedesaan Melalui Pengembangan kewirausahaan ISSN. 1978-4724 Jurnal Kewirausahaan Volume 5 Nomor 2, Desember 2011

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Berusaha, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.